



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016

**TENTANG
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 03/Tahun 2016, Nomor. 171/KPU-Prov-010/V/Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37/BA/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

SEKRETARIAT

Sahrani Hasna Ramadhan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN I

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian Kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	08 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya Kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	02 November 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	02 November 2016	03 November 2016
	8) Penyampaian DPS Kepada PPS	03 November 2016	09 November 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	10) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	28 November 2016	29 November 2016
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan Kepada KPU Kabupaten/Kota	28 November 2016	29 November 2016
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT Kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	15) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb- 1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb- 1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb- 1 tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS Kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb- 1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb- 1 tingkat kabupaten/kota	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb- 1 Kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Rekapitulasi DPTb- 1 Tingkat Provinsi	5 Januari 2017	6 Januari 2017
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Sebelumnya yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	20 Juli 2016	02 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi DKI Jakarta	03 Agustus 2016	07 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	03 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Analisis Dukungan Ganda	03 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Kepada KPU Provinsi DKI Jakarta	13 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	e. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	21 Agustus 2016	03 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	04 September 2016	10 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	11 September 2016	15 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	16 September 2016	18 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Patrai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Patrai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2016	01 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	29 September 2016	01 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	03 Oktober 2016	09 Oktober 2016
	l. Penelitian Hasil Perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	a) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	29 September 2016	06 Oktober 2016
	b) Analisis Dukungan Ganda	29 September 2016	06 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi Kepada PPS Melalui PPK	07 Oktober 2016	08 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	09 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	03 Oktober 2016	09 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	08 November 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	09 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 November 2016	05 Desember 2016
	g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	06 Desember 2016	08 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	05 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib wenindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 November 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Provinsi	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil Audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	03 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS Kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	10 Maret 2017	12 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi Dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH		
	a. Tanpa permohonan PHP	09 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
	a. Tanpa permohonan PHP	10 Maret 2017	9 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Ttd
SUMARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Sahrani Hasna Ramadhan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN II

NO	KEGIATAN	PUTARAN II TANPA PHP		PUTARAN II DENGAN PHP	
		Awal	Akhir	Awal	Akhir
1.	PENETAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN II	04 Maret 2017	04 Maret 2017	16 April 2017	16 April 2017
2.	REKAPITULASI DATA DAN DAFTAR PEMILIH				
	a) Daftar Pemilih Tetap				
	1) Rekapitulasi DPT , DPTb-1 dan DPTb-2 Putaran I tingkat kelurahan	05 Maret 2017	07 Maret 2017	17 April 2017	19 April 2017
	2) Rekapitulasi DPT , DPTb-1 dan DPTb-2 Putaran I tingkat kecamatan	08 Maret 2017	10 Maret 2017	19 April 2017	21 April 2017
	3) Rekapitulasi DPT , DPTb-1 dan DPTb-2 Putaran I tingkat Kab/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT Putaran II	11 Maret 2017	12 Maret 2017	22 April 2017	23 April 2017
	4) Rekapitulasi DPT , DPTb-1 dan DPTb-2 Putaran I tingkat Provinsi	13 Maret 2017	14 Maret 2017	24 April 2017	25 April 2017
	5) Pengumuman DPT oleh PPS	15 Maret 2017	19 April 2017	25 April 2017	09 Juni 2017
3.	SOSIALISASI	04 Maret 2017	15 April 2017	17 April 2017	29 Mei 2017
4.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Produksi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Maret 2017	31 Maret 2017	18 April 2017	14 Mei 2017
	b. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai TPS	01 April 2017	18 April 2017	15 Mei 2017	06 Juni 2017
5.	KAMPANYE				
	a. Penajaman Visi Misi (debat)	06 April 2017	15 April 2017	25 Mei 2017	03 Juni 2017
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	16 April 2017	18 April 2017	04 Juni 2017	06 Juni 2017
6.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 April 2017	18 April 2017	31 Mei 2017	06 Juni 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	19 April 2017	19 April 2017	07 Juni 2017	07 Juni 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	19 April 2017	25 April 2017	07 Juni 2017	13 Juni 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	19 April 2017	19 April 2017	07 Juni 2017	07 Juni 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	19 April 2017	25 April 2017	07 Juni 2017	13 Juni 2017
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	19 April 2017	21 April 2017	07 Juni 2017	09 Juni 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	20 April 2017	26 April 2017	08 Juni 2017	14 Juni 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	26 April 2017	28 April 2017	14 Juni 2017	16 Juni 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 April 2017	01 Mei 2017	17 Juni 2017	19 Juni 2017
8.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	05 Mei 2017	06 Mei 2017	23 Juni 2017	24 Juni 2017
9.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
10.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

NO	KEGIATAN	PUTARAN II TANPA PHP		PUTARAN II DENGAN PHP	
		Awal	Akhir	Awal	Akhir
11	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH				
	a. Tanpa permohonan PHP	07 Mei 2017	09 Mei 2017	25 Juni 2017	27 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
12	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	a. Tanpa permohonan PHP	09 Mei 2017	08 Agustus 2017	27 Juli 2017	26 Oktober 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Sahrani Hasna Ramadhan